

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Manusia pada umumnya merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya bergantung satu sama lain. Makhluk sosial ialah makhluk yang dapat berinteraksi dan membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dan untuk melaksanakan keberfungsian sosial dalam aktivitasnya. Dengan ini, manusia akan mencapai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Kesejahteraan sosial merupakan bidang keilmuan yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kajian utama dari ilmu kesejahteraan sosial sendiri ialah keberfungsian sosial (*social functioning*). Suharto (2017: 1) mendeskripsikan kesejahteraan sosial berdasarkan pada definisi batasan kesejahteraan sosial oleh PBB sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Pengertian lain dari kesejahteraan sosial, dikutip dari *Pre-conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare* yang juga tertulis di dalam Adi (2012) diartikan sebagai semua usaha sosial yang terorganisir yang memiliki tujuan utama bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan konteks sosial. Hal tersebut termasuk berbagai kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu pendapatan mereka, keamanan, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, tradisi, dan lain sebagainya.

Dari berbagai definisi di atas, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai berbagai usaha yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual. Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang secara nyata dapat membantu meningkatkan taraf hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan. Usaha tersebut dapat mencakup individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Menurut Suharto (2017) kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial dan disiplin Pekerjaan Sosial saling berhubungan erat, karena kedua disiplin ini mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, di mana Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Husna, 2014).

Terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam penerapan ilmu kesejahteraan sosial maupun praktik pekerjaan sosial. ketiga aspek tersebut ialah *theoretical background*, *methodology*, dan *intervention method*.

- 1) *Theoretical background* : *theoretical background* atau kerangka pemikiran merupakan aspek yang memberikan landasan pengetahuan untuk mengembangkan metodologi guna meningkatkan kesejahteraan sosial
- 2) *Methodology* : Aspek metode atau *methodology* dibagi menjadi dua yaitu *research method* dan *intervention method*.
 - Metode penelitian (*research method*) : sebagai metode yang dikembangkan guna melakukan pengkajian yang bersifat praktis terhadap fenomena yang ada, maupun upaya intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang telah dikembangkan.
 - Metode intervensi (*Intervention method*) : Metode intervensi merupakan metode dalam ilmu kesejahteraan sosial agar pekerja sosial dapat langsung terlibat dalam penanganan masalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Metode intervensi harus selalu dikembangkan guna melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
- 3) *Practice* : Selain aspek intervensi, aspek praktik juga harus dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan usaha mengembangkan

keterampilan praktis dari mahasiswa, calon pekerja sosial, maupun pekerja sosial itu sendiri.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan sebuah ilmu terapan yang memiliki fokus kajian baik secara teoritis dan metodologis terhadap upaya-upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan mengembalikan keberfungsian sosial serta mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Adapun sasaran ilmu kesejahteraan sosial ialah sebagai berikut (Husna, 2014) :

- 1) Kondisi Kesejahteraan (individu, kelompok, dan komunitas)
- 2) Aktivitas Kesejahteraan
- 3) Kebutuhan (pelayanan sosial)
- 4) Fakta kesejahteraan
- 5) Institusi / organisasi pelayanan sosial
- 6) Negara kesejahteraan

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian masyarakat baik individu, kelompok, dan komunitas agar mereka dapat menjalani kehidupannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Adapun tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10) ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012 :10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem. Pengawasan sistem, dan peubahan sistem.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander & Apte (1982) dikutip dalam Fahrudin (2012 : 12-13) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial memiliki tujuan sebagai berikut :

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mamou mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan tersebut ialah sebagai berikut : (Fahrudin, 2012) :

- 1) Fungsi pencegahan (*preventive*) yaitu sebagai upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga- lembaga sosial baru.

- 2) Fungsi penyembuhan (*curative*) yaitu kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- 3) Fungsi pengembangan yaitu untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- 4) Fungsi penunjang yaitu fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan kumpulan lembaga yang membantu untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, partisipasi aktif masyarakat terhadap penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial serta untuk membantu masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya. Lembaga kesejahteraan sosial merupakan realisasi dari kriteria-kriteria tentang organisasi formal. Dilihat dari segi praktik pekerjaan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tempat kedudukan (*setting*),

program, serta pelayanannya. Tugas operasional dalam lembaga kesejahteraan sosial ditangani oleh pekerja sosial.

Berikut pendapat para ahli mengenai lembaga kesejahteraan sosial Aris (20210:

1. Gordon Hamilton mengklasifikasikan lembaga kesejahteraan sosial ke dalam dua golongan, yaitu *primary setting* dan *secondary setting*. Yaitu :
 - 1) *Primary setting* : pada lembaga kesejahteraan sosial keluarga dan anak di mana metode-metode dan praktek pekerjaan sosial diterapkan dalam keseluruhan kegiatan.
 - 2) *Secondary setting* : pekerjaan sosial merupakan salah satu bagian dari keseluruhan metode dan pelayanan.
2. Arthur Dunham, mengklasifikasikan lembaga kesejahteraan sosial berdasarkan lapangan kerja, wilayah geografinya, dan naungannya. Dunham mengemukakan bahwa jika menurut naungannya, lembaga kesejahteraan sosial terbagi menjadi lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Sedangkan menurut lapangan kerja, sesuai dengan fungsinya dapat dibagi menjadi Sembilan jenis yaitu kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, kesehatan, cacat tubuh, kesehatan mental, pelanggar-pelanggar dewasa, rekreasi dan pendidikan informal, perencanaan, koordinasi, dan program pembangunan, dan lain-lain yang meliputi departemen

kesejahteraan negara bagian dan berbagai badan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Klasifikasi lembaga kesejahteraan sosial berdasarkan terbagi menjadi lembaga lokal, lembaga regional-nasional, lembaga regional-internasional dan lembaga internasional. Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan tidak membedakan klien berdasarkan golongan, ras maupun atas dasar ideologi dan kepercayaannya. Kegiatan dari lembaga kesejahteraan masyarakat antara lain mencakup bantuan dan pelayanan serta mengembangkan usaha-usaha sosial serta usaha-usaha kesejahteraan sosial.

2.1.5. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial, serta memperluas institusi-institusi sosial. (Suharto, 1997) (Suharto, Edi (1997) Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial mencakup (Suharto, 2017) :

- 1) Peningkatan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama

kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

- 2) Peningkatan keberdayaan melalui peningkatan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan.

2.2. Pekerjaan Sosial

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)* adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. (Huda, 2009: 3). Zastrow dalam Suharto (2017) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini termasuk pada penanganan kemiskinan. Suharto (2017: 245) mengungkapkan bahwa meningkatnya kemiskinan di suatu negara dan

ketimpangan ekonomi antar negara merupakan suatu realitas global yang mempengaruhi pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial sejatinya berkaitan dengan bagaimana seseorang yang profesional yakni pekerja sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat mencapai keberfungsian sosialnya. Namun, dalam mendeskripsikan mengenai apa itu keberfungsian sosial, perlu diperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti yang dikemukakan oleh Morales dan Shaefor (1982) dalam Sukoco (1993:3) adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam setiap situasi pertolongan, seorang pekerja sosial memiliki peran penting dalam hal memberikan fasilitas terhadap pertolongan guna terjadinya perubahan yang direncanakan.
- 2) Pekerja sosial akan berusaha untuk membantu orang atau institusi sosial (keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas) dalam memperbaiki dan menangani keberfungsian sosial.
- 3) Konsep teori sistem digunakan oleh pekerja sosial untuk membantu orang agar dapat berinteraksi secara lebih efektif dengan lingkungan sosialnya.
- 4) Dalam membantu seseorang dalam mencapai tujuan dan memperbaiki fungsi sosialnya, pekerja sosial harus mampu memberikan bantuan guna memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.

2.2.2. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan orang-orang yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat

dalam rangka untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial akan membantu masyarakat dalam menemukan solusi untuk pemecahan masalahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan konseling antar individu dengan pekerja sosial maupun diskusi skala sedang hingga besar. Hal ini termasuk pada penanganan kemiskinan.

Seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian sosialnya. Menurut Suharto (2017), dalam proses pertolongannya, peran pekerja sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum, pekerja sosial berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah.

Adapun kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, serta berperikemanusiaan.

- 4) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Jim Ife (2002) dikutip dari Saputra (2018) mengklasifikasikan peran pekerja sosial ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang digunakan untuk membangkitkan semangat serta memberikan dorongan kepada individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat menggunakan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha yang efisien.

Fungsi pekerja sosial di dalam peranan fasilitatif ialah sebagai mediator dalam pemanfaatan lahan dengan pihak lain untuk memperluas aktivitas kerja sama serta menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.

Pekerja sosial memberikan *support* dan dukungan agar individu-individu dapat mengakui, memperkuat, serta menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, dan masyarakat. Dukungan yang diberikan dapat bersifat dukungan formal dan non-formal.

Selain sebagai mediator dan memberikan *support*, pekerja sosial dalam peranan fasilitatif juga dapat membangun consensus dengan berbagai pihak untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengembangkan potensi individu, kelompok, dan masyarakat serta

memfasilitasi individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan marketing hasil produksi.

2. Peran Pendidikan

Pekerja sosial, dalam melaksanakan tugasnya juga memainkan peran dalam menentukan agenda, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan akan tetapi lebih kepada berperan aktif dalam memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman, bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesadaan, memberikan informasi, konfrontasi, serta melakukan pelatihan bagi individu, kelompok, dan masyarakat.

3. Peran Representasional

Peran representasional merupakan peran saat pekerja sosial menjalin interaksi dengan badan-badan di masyarakat yang tujuannya dapat bermanfaat bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Peranan ini dilakukan antara lain dengan cara :

- a. Menemukan sumber-sumber dari luar (sumber eksternal) namun tetap dibarengi dengan sejumlah pertimbangan yang matang, seperti halnya memberi bantuan dalam bentuk modal usaha serta dibarengi dengan pelatihan pengembangan potensi dan produktivitas dari berbagai donatur.

- b. Melakukan advokasi demi membela kepentingan-kepentingan individu, kelompok dan masyarakat seperti mendukung upaya-upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.
 - c. Memanfaatkan media massa dalam rangka mengenalkan hasil produksinya. Tujuannya agar mendapatkan dukungan serta sokongan dari pihak lain; terbukanya jaringan kerja dengan mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak termasuk kelompok; dan berusaha mendorong mereka untuk ikut serta dalam upaya mengembangkan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Selain itu juga pekerja sosial dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan *stakeholder*.
4. Peranan Teknis.

Peranan teknis merupakan perananan dimana pekerja sosial melakukan pengumpulan serta menganalisis data dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer, serta kemampuan mempresentasikan sesuatu secara verbal maupun tertulis, mengatur serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan *need assessment* atau asesmen kebutuhan bagi pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

Peran-peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individu, kelompok ataupun dalam skala yang lebih luas yaitu masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan data yang bisa dipakai baik untuk mengundang perhatian dari *stakeholders* untuk pengembangan potensi termasuk di dalamnya membantu dalam promosi. Dengan begitu

pekerjaan sosial mempunyai peran yang begitu penting dalam pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

Sementara menurut Zubaedi (2013:50) Dalam realisasinya, peran pendampingan sosial diaktualisasikan oleh pekerja sosial melalui lima peran berikut :

1. Peran Fasilitator : Peran fasilitator diharapkan dapat membantu suatu kelompok masyarakat memperbaiki penyelesaian masalah sosial yang sedang dihadapi dan membuat keputusan secara tepat dalam rangka mewujudkan cita-cita hidup mereka yang lebih bermutu. Tanggung jawab sebagai fasilitator direalisasikan oleh pekerja masyarakat melalui upaya-upaya yang memberi harapan, mengurangi sikap penolakan dan ambivalensi, menghormati dan mengarahkan perasaan, mengidentifikasi dan mendorong kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, memilah masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan serta mengarahkan kelompok sasaran agar terfokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

Menurut Suharto (2003: 10) dikutip dalam Zubaedi (2013: 51), adapun tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator sebagai berikut :

- 1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan.

- 3) Mendorong komunikasi, relasi, menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan
 - 4) Memfasilitasi keterikatan, sinergi sebuah sistem dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan.
 - 5) Memfasilitasi pendidikan dalam rangka membangun pengetahuan dan keterampilan.
 - 6) Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama untuk mendorong kegiatan kolektif.
 - 7) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
 - 8) Memfasilitasi penetapan tujuan.
 - 9) Merancang solusi-solusi alternatif.
 - 10) Mendorong pelaksanaan tugas.
 - 11) Memelihara relasi secara sistemik.
 - 12) Memecahkan konflik
2. Peran Broker : Seorang broker diartikan sebagai seseorang yang membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Ia berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Begitu pula dalam pekerjaan sosial, seorang *broker* memiliki peran dalam transaksi sosial dan pembentukan jaringan pelayanan sosial. Pada konteks ini, pekerja sosial sebagai *broker* perlu memahami kualitas pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi lingkungan dengan maksud agar ia dapat memenuhi keinginan kelompok sasaran dalam memperoleh “keuntungan” maksimal. Adapun Peranan pekerja sosial sebagai broker, menurut Suharto (2003: 10-11), dikutip dalam Zubaedi (2013: 53) seorang pekerja sosial dalam proses pendampingan sosial diharapkan mengaktualisasikan tiga kemampuan sebagai berikut :

- 1) Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber daya kemasyarakatan secara tepat.
 - 2) Mampu menghubungkan kelompok sasaran dengan sumber daya secara konsisten.
 - 3) Mampu mengevaluasi efektifitas sumber daya yang dimiliki dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.
3. Peran Mediator : Mediator diperlukan dalam tahap mediasi. Seorang pekerja sosial sebagai berperan sebagai pihak yang mediator membantu pihak-pihak yang berseberangan secara sukarela dengan niat untuk mencapai suatu penyelesaian yang dapat saling diterima atas masalah-masalah yang tengah diperselisihkan.

Tujuan mediasi adalah membantu para pihak menegosiasikan penyelesaian suatu konflik. Para pihak yang

menggunakan mediator biasanya karena mereka terlibat konflik yang tidak mampu diselesaikan sendiri. Dengan demikian, peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Peran mediator yang dapat dilakukan meliputi negosiasi, pendamai (pihak ketiga) dan berbagai macam upaya resolusi konflik.

Adapun beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan oleh pekerja masyarakat ketika menjalankan perannya sebagai mediator adalah:

- 1) Menemukan titik-titik persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- 2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- 3) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- 4) Menghindarkan situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- 5) Berupaya melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- 6) Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- 7) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.

- 8) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
 - 9) Menggunakan prosedur-prosedur persuasi.
4. Peran Pembela : Pekerja sosial harus menjalankan peran pembelaan (advokat) jika kelompok sasaran mengalami kendala dalam mengakses pelayanan sosial dan sumber-sumber daya. Menurut Suharto (2002: 08) dikutip dari Zubaedi (2013: 54), peranan pembelaan (advokasi) dalam konteks ini menjadi salah satu bidang pekerjaan sosial yang banyak bersentuhan dengan kegiatan politik.

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan ketika seorang pekerja sosial menjalankan peranan sebagai pembela masyarakat, yaitu :

- 1) Keterbukaan : membiarkan masyarakat berbicara dan menyampaikan pandangan-pandangannya.
- 2) Perwakilan secara luas : mewakili segala tindakan yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- 3) Keadilan : menerapkan kesetaraan atau kesamaan dalam sistem sosial sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- 4) Pengurangan permusuhan : mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- 5) Informasi : menyajikan berbagai pandangan yang masing-masing secara bersamaan didukung dengan dokumen dan analisis.

- 6) Dukungan: mendukung terciptanya partisipasi secara luas.
 - 7) Kepekaan : mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.
5. Peran Pelindung : Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi sosial lain berisiko menjadi korban.

Menurut Suharto (2002:10) dikutip dari (Zubaedi, 2013) seorang pekerja sosial ketika menjalankan perannya sebagai pelindung orang-orang lemah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- 2) Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- 3) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab secara etik, legal dan rasional dalam praktek pekerjaan

2.3. Pelayanan Sosial

2.3.1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan sebuah aksi untuk dapat meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat Alfred J Khan (1981) mendefinisikan pelayanan sosial sebagai:

Suatu layanan meliputi iprogram yang dimunculkan dengan mengesampingkan mekanisme pasar dalam pemenuhan kebutuhan dasarbaik fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bertujuan meningkatkan keberfungsian sosial serta

untuk memudah kanjangkauan dan aksesibilitas layanan bagi lembaga masyarakat yang mengalami kesulitan.

Pengertian pelayanan sosial menurut Suharto (2020: 14-15) ialah seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan. Sementara dalam artian sempit, pelayanan sosial dapat diartikan sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang di mana memiliki fokus kepada masyarakat dan kelompok kurang beruntung yang rentan terhadap kesenjangan.

Pelayanan sosial juga dapat didefinisikan sebagai salah satu dari bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan. Secara historis, perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dijauhkan dengan berdisirinya sistem negara kesejahteraan (welfare state). Secara ideologis, pelayanan sosial didasari oleh keyakinan bahwa tindakan sosial dan pengorganisasian sosial merupakan wujud nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak masyarakat dalam mempromosikan kesejahteraan negara.

Pelayanan sosial dikategorikan sebagai sebuah pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap individu, kelompok, dan masyarakat yang dapat berupa kegiatan-kegiatan dan proses intervensi yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan sosial, terdapat tujuh tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

1) Tahap pendekatan awal *Engagement, Intake, Contract* (EIC).

Proses pendekatan dan pelamaran seseorang yang memiliki masalah untuk mendapatkan pertolongan dari pekerja sosial.

2) Tahap pengungkapan masalah (*Assessment*)

Proses pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah serta mengetahui kebutuhan-kebutuhan klien.

3) Tahap Perencanaan (*Planning*). Proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya seperti metode-metode, teknik, sarana, biaya dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebagai proses pertolongan.

4) Tahap Intervensi.

Proses pengimplementasian rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi, dan advokasi.

5) Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk menilai kinerja yang telah dilakukan selama proses pertolongan. Tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui efektifitas serta hasil dari kegiatan pertolongan. Dalam tahap evaluasi dapat ditemukan kekurangan serta hambatan dalam melakukan proses pertolongan.

6) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial dengan penerima pelayanan. Terminasi dilakukan setelah semua kegiatan dari awal pertolongan hingga akhir peertolongan selesai dan sesuai kontrak yang telah disepakati.

7) Tahap *referral*.

Tahap referral merupakan tahapan dimana pekerja sosial memberikan tanggung jawab pelayanan klien kepada pekerja sosial lain dikarenakan pekerja sosial tidak dapat melanjutkan proses pertolongan kepada klien atau klien menolak untuk melanjutkan proses pertolongan dengan pekerja sosial tersebut.

2.3.2. Tujuan Pelayanan Sosial

Tujuan pelayanan sosial menurut Soetarso sebagai berikut :

- 1) Melindungi atau memulihkan kehidupan keluarga
- 2) Membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya.
- 3) Meningkatkan proses perkembangan, yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.
- 4) Mengembangkan kemampuan orang dalam hal memahami, menjangkau, dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan.

2.3.3. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki fungsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan. Misalnya pada pusat kegiatan untuk anak dan remaja, termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui kelompok atau pekerja sosial dengan kelompok.

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan bertujuan untuk mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, serta pengembangan hubungan sosial. Tujuan kegiatan ini selain untuk sosialisasi dapat juga meningkatkan tujuan dan motivasi, sehingga akan meningkatkan mutu perkembangan kepribadian termasuk aspek kognitif dan emosional.

2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti. Misalnya untuk korban yang mengalami kekerasan dalam keluarga dengan jalan menggunakan kelompok primer untuk memperkuat dan menggantikan fungsi-fungsi yang tidak lagi mengalami gangguan. Selain bentuk di atas, pelayanan ini juga dapat berupa bantuan singkat, intensif, dan pribadi sifatnya dalam program perbaikan situasi lingkungan sosial.

Tujuan pelayanan ini adalah pemulihan kemampuan pelaksanaan peranan-peranan sosial yang sampai saat ini masih sulit ditemukan

3. Pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat. Misalnya rujukan kepada pekerja sosial atau tenaga profesional lain untuk

mendapatkan pelayanan tertentu yang dibutuhkan. Dapat juga didirikan pusat informasi.

4. Pelayanan ini juga berfungsi untuk menghubungkan seseorang dengan sistem sumber pelayanan sosial yang diperlukan agar lebih mudah diketahui, lebih mudah dijangkau bentuk pelayanan ini dapat berupa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelayanan darurat lewat telepon, lembaga khusus yang menangani keluhan, pendidikan konsumen, pelayanan melalui media sosial, dan lain-lain. (Khan, 1979, hal. 27).(Setiyawati et al., n.d.)

2.3.4. Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial

Dalam Suharto (2020), jenis dan cakupan dalam pelayanan sosial dijelaskan sebagai berikut :

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*) (Suharto, 2020). Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan suatu perangkat negara yang didisain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan yang berdasar pada prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jarring pengaman pendapatan (*financial safety net*) atau pemeliharaan pendapatan (*income maintenance*).

1) Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. negara memiliki kewajiban azasi untuk dapat menyediakan perumahan bagi warhanya, khususnya bagi mereka yang tergolong keluarga kurang mampu (miskin). Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah berupa perumahan public atau perumahan sosial. selain Rusunawa dan RSS, Perumahan sosial dapat mencakup :

- a. Penyediaan rumah sewa dewan kota yang relatif murah. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, perumahan jenis ini disebut *city council housing*.
- b. Pemberian subsidi terhadap asosiasi-asosiasi penyedia perumahan bagi kelompok-kelompok khusus. Misalnya, perumahan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- c. Pemberian subsidi atau kemudahan akses kredit bagi pembelian rumah.
- d. Bantuan finansial bagi lembaga sukarela yang menyediakan akomodasi dan dukungan terhadap para tunawisma
- e. Pemberian izin dan pengawasan terhadap akomodasi atau rumah-rumah sewa yang diselenggarakan masyarakat sehingga tidak melanggar standar dan ketentuan yang berlaku. (Suharto, 2020).

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan sosial. karena orang yang sejahtera bukan saja orang yang berpenghasilan cukup atau memiliki tempat tinggal yang layak melainkan apakah orang tersebut sehat dan mudah mengakses fasilitas kesehatan. Skema pelayanan kesehatan public biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan. (Suharto, 2020)

Peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan public mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk kepada penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

3) Pendidikan

Menurut Suahrto (2020), Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan yaitu :

Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi, dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta, maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan., termasuk di dalamnya penyedia skema skema beasiswa, dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu.

Pendidikan sejatinya harus bersifat wajib terutama bagi anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama (Sembilan tahun). Pendidikan formal yang bersifat umum dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Pendidikan Tinggi. Sementara pendidikan alternatif untuk orang-orang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil (KAT), hingga anak jalanan dapat diseleggarakan bersama oleh Kementrian Sosial dan kembaga-lembaga sukarela.

4) Pelayanan Sosial Personal (*Personal Social Service*)

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang populer sejak tahun 1960an. Pelayanan ini menunjukkan pada berbagai bentuk perawatan sosial (*Social care*) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. secara garis besar, pelayanan sosial personal dibagi ke dalam tiga jeis yaitu perawatan anak (*child care*), perawatan masyarakat (*community care*), peradilan kriminal (*criminal justice*) (Suharto, 2020).

2.4. Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan besar namun mendasar yang terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat di negara-negara berkembang. Suharto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (2020) mengatakan bahwa problema utama di negara berkembang adalah kemiskinan. Bank dunia mencatat bahwa setidaknya setengah dari jumlah populasi dunia hidup dengan pendapatan di bawah US\$2 per harinya.

Menurut Amartya Sen, dikutip dari Suharto (2020 : 75), kemiskinan terjadi bukan saja karena tidak adanya sumber-sumber melainkan karena tidak adanya hak (*entitlement*) atas sumber-sumber itu. BPS dan Depsos (2002:4) dikutip dalam Suharto (2017: 133 – 134) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Untuk dapat mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada “Handbook on Poverty and Inequality” yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Fenomena kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi khususnya pada pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, kemiskinan juga dapat ditandai dengan kondisi serba kekurangan, seperti

kekurangan pendidikan, kesehatan yang memburuk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. (SMERU dalam Suharto et.al., 2004 dikutip dari Suharto 2017).

2.4.2. Ciri-Ciri Kemiskinan

SMERU dalam Suharto (2017:132) menunjukkan bawah kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Keretakan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacar fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

2.4.3. Dimensi Kemiskinan

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004 : 1-6) dikutip dari Suharto (2017 : 132-133), membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang sering sekali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan)
3. Kemiskinan sosial yaitu kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas
4. Kemiskinan konsekuensial yaitu merupakan kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

2.5. Program Keluarga Harapan (PKH)

2.5.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program perlindungan sosial di Indonesia yang termasuk ke dalam bentuk bantuan

sosial. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang memenuhi syarat tertentu dimana keluarga-keluarga tersebut terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

2.5.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.5.3. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah kegiatan dimana para penerima manfaat didampingi dalam proses pelaksanaan penerimaan bantuan. Kegiatan pendampingan bagi penerima manfaat diperlukan guna mempercepat salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian penerima manfaat terkait

pemanfaatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain membantu pemanfaatan pelayanan sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertugas untuk membantu para penerima manfaat agar dapat mengembangkan dan memajukan dirinya seperti membantu penerima manfaat untuk dapat menjalankan usaha kecil mandiri yang dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan pendampingan bagi penerima manfaat dilakukan dengan dua agenda yakni Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

1. Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan Kelompok yang kemudian disingkat menjadi PK merupakan sebuah kegiatan pertemuan rutin yang dufasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif serta edukatif, dengan memberikan informasi mengenai tata tertib dan aturan Program Keluarga Harapan (PKH), serta informasi terkait akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah proses belajar yang secara terstruktur ditujukan untuk

mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada penerima manfaat. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh kelompok penerima manfaat yang menjadi dampungannya yang menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi penerima manfaat.

Kegiatan P2K2 juga dikenal sebagai kegiatan *family development session* (FDS). Kegiatan FDS merupakan kegiatan yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan yang membahas mengenai informasi penting mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

1) Tujuan Kegiatan P2K2

Adapun tujuan kegiatan P2K2 secara umum yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga dapat mendorong terciptanya perubahan perilaku.

a. Komponen Kegiatan P2K2

a) Modul

Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup penerima manfaat dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, dan kesejahteraan sosial serta

modul lainnya yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

b) Bahan Ajar

Bahan ajar pada kegiatan P2K2 merupakan modul, buku pintar, *flipchart*, poster, dan brosur serta alat lainnya yang digunakan untuk mendukung penyampaian kegiatan P2K2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial yang didukung oleh K/L terkait serta peran pemerintah daerah.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan P2K2

Kegiatan P2K2 dilaksanakan setiap bulan bagi penerima manfaat di masa kepesertaannya sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Pengecualian Program P2K2

Program P2K2 dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*). Keadaan *force majeure* sendiri ialah suatu keadaan di mana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.

2.5.4. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sasaran yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin yang komponennya adalah sebagai berikut :

1. Komponen Kesehatan

1) Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusu

Ibu hamil, nifas, dan menyusui merupakan kondisi dimana seseorang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui. (Kementerian Sosial, 2021)

2) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 – 6 tahun yang belum bersekolah. (Kementerian Sosial, 2021)

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan ialah anak usia sekolah di mana anak tersebut berusia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Anak usia sekolah yang dimaksud ialah anak yang menempuh tingkat SD/Mi sederajat, SMP/MTs sederajat, dan atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

1) Lansia

Komponen penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) lansia ialah seseorang yang berusia lanjut yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dan berada dalam keluarga.

2) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat ialah seorang penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-

hari dan/atau sepanjang hidupnya bergantung kepada orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dan berada dalam keluarga. (Kementerian Sosial, 2021)

2.6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

2.6.1. Pengertian Kebutuhan Dasar

Masyarakat di dalam kesehariannya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar memiliki peran sebagai penunjang kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Sesuai dengan namanya, kebutuhan dasar menjadi hal yang paling dasar yang harus dimiliki manusia. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sama walaupun datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kebutuhan dasar dapat dipengaruhi dari internal atau diri sendiri maupun external yaitu dari pihak luar.

Maslow (1998) dalam bukunya yang berjudul *Teori Hierarki Kebutuhan Dasar Manusia*, membagi urutan atau tingkatan kebutuhan dasar manusia menjadi lima bagian, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelimanya menjadi unsur penting kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas persepsi seseorang individu atas lima macam tipe dasar kebutuhan. (Iskandar, 2016)

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological needs*)

Teori kebutuhan fisiologis merupakan teori yang membahas kebutuhan dasar yang bersifat primer. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat dasar pertama yang mencakup kebutuhan biologis maupun fisik dalam kelangsungan kehidupan. Kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan, tempat tinggal, air, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan fisik manusia.

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (*safety needs*)

Kebutuhan akan rasa menunjukkan bahwa manusia sejatinya ingin hidup dengan aman atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman akan memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya (Kebutuhan, 2016).

3. Kebutuhan untuk diterima (*Social Needs*)

Diurutan ketiga teori kebutuhan menurut Maslow, terdapat kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima pada dasarnya tertanam pada setiap diri manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Kebutuhan penerimaan dibutuhkan diberbagai lingkungan seperti di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan tinggal di masyarakat.

4. Kebutuhan untuk dihargai (*self esteem needs*)

Kebutuhan untuk dihargai merupakan kebutuhan yang berada di tingkat kedua menurut teori Maslow. Kebutuhan untuk dihargai tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi yang besar untuk diakui keberadaannya dalam masyarakat.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization*)

Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia untuk mengalami proses pemenuhan diri. Kebutuhan aktualisasi diri menduduki posisi tertinggi dalam teori hierarki Maslow. Kebutuhan ini diantaranya mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi dalam diri dalam rangka untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan aktualisasi diri dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengembangkan diri, membaaur dalam masyarakat, dan melakukan pencapaian pada diri mereka.

Gambar 3. Piramida Kebutuhan Dasar Maslow



Susetiawan dalam Huraerah (2011) mengelompokan kebutuhan dasar ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Konsumsi bahan-bahan pokok tertentu, seperti sandang, pangan, dan papan yang dapat dijangkau oleh setiap orang.
2. Pelayanan pokok yaitu pendidikan, kesehatan, akses air bersih, yang di mana setiap orang memiliki hak akses yang sama.
3. Hak dalam berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan program yang berpengaruh pada perkembangan pribadi.

Kebutuhan dasar adalah sebuah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh seseorang dalam menjaga keseimbangan hidupnya secara fisiologis maupun secara psikologis. Hal ini dilakukan untuk memertahankan kehidupan dan kesejahteraan (Radissa et al., 2020).

2.6.2. Komponen Kebutuhan Dasar

Virginia Henderson, salah satu tokoh keperawatan dan peneliti, menerangkan terdapat empat belas komponen kebutuhan dasar pada manusia. Dikutip dari Alligood, MR (2014) *Nursing Theorists and Their Work*. Komponen tersebut ialah :

1. *Breath normally* (bernapas dengan normal)
2. *Eat and drink adequately* (kebutuhan makan dan minum yang adekuat)
3. *Eliminate body wastes* (kebutuhan eliminasi)
4. *Move and maintain desirable postures* (kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik)
5. *Sleep and rest* (kebutuhan tidur dan beristirahat)

6. *Select suitable clothes; dress and undress* (kebutuhan berpakaian)
7. *Maintain body temperature within a normal range by adjusting clothing and modifying the environment* (mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan)
8. *Keep the body clean and well groomed and protect the integument* (menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit)
9. *Avoid dangers in the environment and avoid injuring others* (menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain)
10. *Communicate with others in expressing emotions, needs, fears, or opinions* (Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan atau pendapat)
11. *Worship according to ones's faith* (mempercayai keimanan/ketuhanan)
12. *Work in such a way that there is a sense of accomplishment* (Kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan)
13. *Play or participate in various forms of recreation* (kebutuhan akan hiburan atau rekreasi)
14. *Learn, discover, or satisfy the curiosity that leads to normal development and health and use the available health facilities* (Belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.

2.6.3. Kebutuhan Dasar Bagi Ibu Hamil

Ibu hamil sebagai salah satu komponen PKH akan mendapatkan bantuan yang disalurkan guna menunjang kesehatan ibu dan anak. Seperti yang kita ketahui, dan pemenuhan kebutuhan pada ibu hamil sangat penting. Hal tersebut guna menjaga ibu saat proses hamil hingga pasca melahirkan begitu pula pada proses merawat anak.

Sulistyoningsih (2011: 108) mengungkapkan bahwa gizi ibu sebelum dan selama proses hamil mempengaruhi status gizi ibu dan bayi. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman yang bergizi serta akses pada pelayanan kesehatan akan sangat membantu ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin yang tanpa bantuan PKH tidak memungkinkan mereka dapat memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut. Memperhatikan keadaan ibu hamil menjadi sangat penting terutama gizi ibu hamil.

Wanita yang mengalami kekurangan gizi pada saat sebelum hamil atau selama minggu pertama kehamilan akan memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi yang mengalami rusak otak dan sumsum tulang diakibatkan pembenyukan sistem saraf yang sangat peka pada 2-5 minggu pertama kehamilan. Arisman (2004) dalam Sulistyoningsih (2011: 108) menerangkan bahwa ketika seseorang yang hamil kekurangan gizi, mereka kan cenderung melahirkan bayi dengan berat badan rendah yaitu kurang dari 2.500 gram. Hal ini dikarenakan pada masa-masa tersebut janin sedang mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat dan akan terjadi penimbunan jaringan lemak.

Adapun kebutuhan gizi ibu selama hamil yaitu :

- a. Energi
- b. Vitamin A
- c. Vitamin B 12
- d. Asam Folat
- e. Vitamin D
- f. Zat Besi
- g. Yodium
- h. Kalsium
- i. Serat

Dalam pelaksanaan program PKH, ibu hamil yang memiliki status sebagai penerima manfaat akan menerima bantuan berupa uang yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama proses kehamilan hingga melahirkan. Selain uang tunai, ibu hamil juga akan mendapatkan bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp.200.000 setiap bulannya yang di mana bantuan ini berupa sembako seperti bahan makanan yang berkarbohidrat dan berprotein yang di mana diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam memenuhi asupan gizi nya.

2.6.4. Kebutuhan Dasar Bagi Balita dan Anak Usia Sekolah.

Balita atau anak prasekolah merupakan anak yang berusia antara satu sampai lima tahun. (Sulistiyoningsih, 2011: 184). Balita merupakan anak yang sedang tumbuh dan berkembang yang dalam proses

perkembangannya membutuhkan banyak dukungan baik secara ekonomi dan sosial.

Perkembangan balita memiliki arti bahwa balita mengalami perubahan diri menuju kematangan yang bersifat progressif dan berkelanjutan. Perkembangan balita salah satunya didasari dari pemenuhan kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui, anak yang sedang mengalami pertumbuhan akan sangat banyak membutuhkan asupan gizi-gizi seimbang yang dapat menunjang proses pertumbuhannya.

Seorang balita yang berstatus sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima bantuan sebesar Rp. 750.000 per 3 bulan yang di mana dari uang tersebut, nantinya ibu atau anggota keluarga yang menjadi penanggung jawab menerima bantuan dalam keluarga dapat memberikan anak balitanya apapun yang ia butuhkan sebagai syarat dan penunjang tumbuh kembangnya. Adapun kebutuhan dasar pada balita sebagai penunjang pertumbuhannya ialah seperti susu, makanan ber serat dan berprotein, dan vitamin-vitamin penunjang lainnya.

Sama seperti halnya Balita, seorang anak yang berada di usia sekolah juga harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut untuk menunjang keaktifan anak di sekolah serta untuk membantu meningkatkan kemampuan dan konsentrasinya dalam melaksanakan pendidikan dan aktivitasnya sehari-hari.

Anak usia sekolah tentu juga membutuhkan asupan gizi seimbang dan multivitamin untuk menunjang pertumbuhannya. Bantuan lainnya yang

juga dibutuhkan oleh anak usia sekolah ialah kebutuhan penunjang pendidikan seperti seragam dan alat tulis. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada anak usia sekolah yang merupakan bagian dari penerima manfaat diharapkan dapat membantu para anak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

2.6.5. Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia

Pengertian Lansia menurut *World Health Organization* ialah seseorang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Kelompok lansia dapat dikatakan sebagai populasi rentan. Hal ini dikarenakan lansia cenderung memiliki risiko yang lebih besar terhadap masalah kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh dan dapat berpengaruh pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Semakin tua usia seseorang, maka semakin renta pula keadaan fisiknya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam mereka untuk bekerja, memperoleh uang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melangsungkan kehidupannya, lansia membutuhkan dukungan baik secara mental, fisik, dan finansial. Hal tersebut tentu sulit didapatkan dari lansia yang berasal dari keluarga miskin.

Pemenuhan kebutuhan dasar sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup manusia termasuk pada lansia. Apabila kebutuhan dasar lansia dapat terpenuhi dengan baik, maka kualitas hidup lansia juga akan meningkat dan hal tersebut dapat membantu angka harapan hidup pada lansia.

Program Keluarga Harapan (PKH) memasukkan kategori lansia sebagai salah satu dari komponen mereka. Lansia, selain memperoleh bantuan uang tunai dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) nantinya juga akan memperoleh kemudahan akses dalam pelayanan kesehatan yaitu dengan disediakan posyandu bagi lansia. Pelayanan posyandu bagi lansia menyediakan pelayanan kunjungan untuk lansia selama satu kali perbulan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap lansia. Syarat dari penerima manfaat kategori lansia dalam mengunjungi posyandu lansia ialah dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2.6.6. Kebutuhan Bagi Disabilitas

Setiap manusia perlu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai uoaya untuk terus melanjutkan kehidupan. Hal ini tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kementerian Sosial Republik Indonesia mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut:

Penyandang disabilitas merupakan setiap yang orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Kemensos, 2018)

Sementara pengertian disabilitas menurut *The Disability Services Act* dikutip dari Radissa (2020) merupakan:

Ketidakkampuan seseorang yang disebabkan oleh intelektual, psikiatris, kognitif, neufologis, serta gangguan fisik, atau kombinasi setiap gangguan tersebut dan memungkinkan untuk menjadi permanen, serta menghasilkan seseorang yang memiliki kapasitas terbatas dalam interaksi sosial, komunikasi, belajar,

mobilitas, pengambilan keputusan atau perawatan diri, dan membutuhkan layanan sosial yang berlanjut.

Walaupun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas tetap perlu memenuhi kebutuhan dasarnya karena sejatinya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar berpengaruh bagi setiap individu secara merata dan setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang disabilitas yang berstatus sebagai penerima manfaat memperoleh bantuan sama dengan komponen lainnya yaitu uang tunai dan Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, sama halnya dengan komponen lansia, penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengecekan kesehatan di posyandu terdekat dalam memeriksakan kesehatannya. Syaratnya ialah dengan penyandang disabilitas membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).